

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah suatu proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik dan terus menerus untuk mencapai tujuan yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan harus diarahkan sedemikian rupa sehingga setiap tahap semakin mendekati tujuan. Masalah besar dalam pembangunan yang dihadapi banyak negara berkembang termasuk Indonesia adalah kemiskinan atau jumlah orang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*). Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan primer. Indonesia adalah sebuah negara yang penuh paradoks, negara ini subur dan kekayaan alamnya melimpah, namun cukup besar rakyatnya yang tergolong miskin. Pada hakikatnya pembangunan perekonomian merupakan rangkaian kegiatan dengan memanfaatkan seluruh

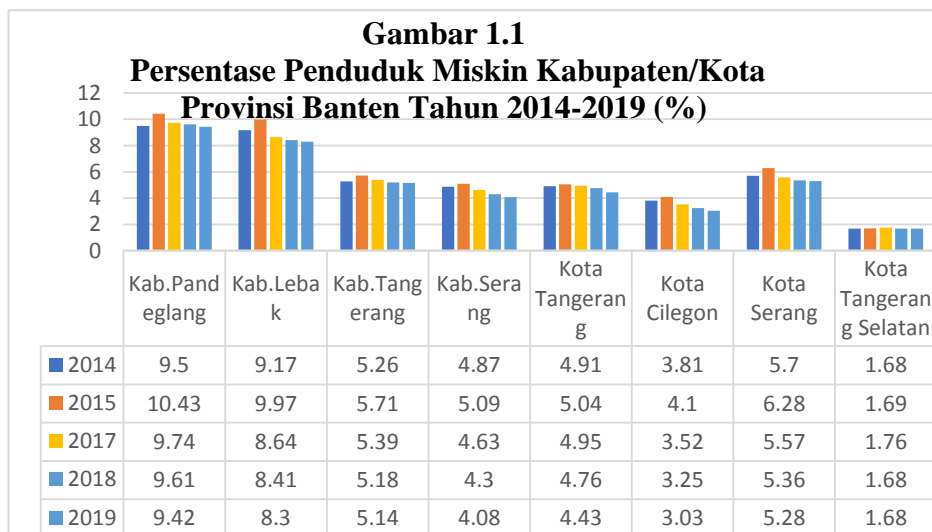
potensi sebagai modal dasar yang efektif dan efisien melalui perencanaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ditujukan peningkatan pendapatan masyarakat yang tidak lepas dari keberhasilan pembangunan ekonomi dan di ukur dalam tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah.

Berdasarkan isi dokumen Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK), bahwa pemerintah Indonesia menetapkan sembilan sektor kebijakan pembangunan dengan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama. Target penanggulangan kemiskinan adalah dengan langkah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dibidang kesehatan, pangan dan gizi. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi merupakan sesuatu yang sangat fundamental dalam konteks pengembangan kesejahteraan masyarakat (*welfare*), pembangunan manusia (*human development*) dan pengurangan kemiskinan (*poverty reduction*).¹ Permasalahan

¹ M. Alhudori, "Pengaruh IPM, PDRB Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Penduduk Miskin di Provinsi Jambi" *Ekonomis : Journal Of Economics and Business*, Vol. 1 No. 1 (September 2017)

strategis di pemerintahan Provinsi Banten tidak jauh berbeda dengan masalah pemerintahan pusat (problem nasional), yakni masih tingginya angka kemiskinan.

Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh negara – negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara – negara maju, seperti, Inggris dan Amerika Serikat. Negara Inggris mengalami kemiskinan di penghujung tahun 1700-an pada era kebangkitan revolusi industri yang muncul di Eropa. Pada masa itu kaum miskin di Inggris berasal dari tenaga – tenaga kerja pabrik yang sebelumnya sebagai petani yang mendapatkan upah rendah, sehingga kemampuan daya belinya juga rendah. Mereka umumnya tinggal di pemukiman kumuh yang rawan terhadap penyakit sosial lainnya, seperti prostitusi, kriminalitas, dan pengangguran.²



Sumber: BPS Prov. Banten

Untuk perkembangan persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten periode 2014 – 2019, dapat dilihat bahwa dari tahun 2014 di kabupaten Kabupaten Pandeglang mengalami fluktuasi disusul oleh Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan namun rata – rata data persentase jumlah penduduk miskin lebih cenderung mengalami penurunan.

Salah satu sumber yang menyebabkan pengaruh jumlah penduduk miskin salah satunya adalah Indeks

Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu terobosan dalam menilai pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia adalah salah satu tolak ukur pembangunan suatu wilayah yang berkorelasi negatif terhadap kondisi kemiskinan di wilayah tersebut. Karena itu di harapkan suatu daerah yang memiliki nilai IPM tinggi, idealnya kualitas hidup masyarakat juga tinggi atau dapat dikatakan pula bahwa jika nilai IPM tinggi, maka seharusnya tingkat kemiskinan rendah. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen, yaitu angka harapan hidup yang mengukur keberhasilan dalam bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata – rata lamanya bersekolah yang mengukur keberhasilan dalam bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata – rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mengukur keberhasilan dalam bidang pembangunan hidup yang layak.

Pertumbuhan ekonomi atau peningkatan PDRB merupakan salah satu ukuran dan indikasi penting untuk menilai keberhasilan dari pembangunan ekonomi suatu daerah di tinjau dari sisi ekonominya. Namun demikian tingginya PDRB tidak menjamin bahwa seluruh penduduk di suatu wilayah telah menikmati kemakmuran. PDRB hanya merupakan gambaran secara umum dari kesejahteraan masyarakat. Membaiknya indikator pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap masalah kemiskinan yang menjadi isu penting. PDRB sering digunakan sebagai indikator pembangunan. Semakin tinggi PDRB suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakat daerah tersebut. Hal ini berarti juga semakin tinggi PDRB semakin sejahtera penduduk suatu wilayah. Dengan kata lain jumlah penduduk miskin akan berkurang. PDRB merupakan data statistik yang merangkum perolehan nilai tambah yang tercipta akibat proses produksi baik barang ataupun jasa di suatu wilayah/region pada satu periode tertentu, biasanya setahun atau triwulan tanpa

memperhatikan asal/domisili pelaku produksinya merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk melihat tingkat perkembangan dan struktur perekonomian di suatu daerah.

Pengangguran dapat di sebabkan oleh bertambahnya angkatan kerja baru yang terjadi tiap tahunnya. Sementara itu penyerapan tenaga kerja tidak bertambah selain itu adanya industri yang bangkrut sehingga harus merumahkan tenaga kerjanya. Hal ini berarti, semakin tinggi jumlah pengangguran maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin.³ Perlu diketahui bersama bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten tertinggi Se – Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa TPT daerah ini ada di angka 8,52 % pada Agustus 2018. Angka ini bahkan lebih besar dari rata – rata TPT nasional 5,34 %.⁴

³M. Alhudori, “*Pengaruh IPM...* h. 2 - 3

⁴“Banten Duduki Peringkat Teratas Angka Pengangguran di Indonesia” <http://www.m.detik.com>, diakses pada 9 mar. 2020 pukul 21.45 WIB.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, di Provinsi Banten dalam periode 2014-2019 terjadi fenomena penurunan tingkat kemiskinan. Namun, belum meratanya hasil usaha pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan ke seluruh kabupaten/kota, padahal dampak kemiskinan sangat buruk terhadap perekonomian. Disamping itu BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) di provinsi Banten tertinggi Se – Indonesia, hal ini menjadi tolak ukur pemerintah untuk menekan angka pengangguran di Provinsi Banten, sehingga arah kebijakan dapat terukur dalam usaha mengentaskan berbagai pengaruh kemsikinan di Provinsi Banten. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk membahas mengenai jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten, selain itu di dalam penelitian ini juga akan dilihat seberapa besar pengaruh variabel IPM, PDRB, dan Jumlah Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Banten pada tahun 2014 – 2019. Maka peneliti tertarik untuk mengambil Judul **“Pengaruh IPM, PDRB Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Penduduk Miskin Di Provinsi Banten Tahun 2014 – 2019”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditentukan identifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten masih tinggi terutama di daerah – daerah terpencil.
2. Berbagai program dan kebijakan Pemerintah Provinsi Banten belum efektif dalam mengentaskan masalah kemiskinan di Provinsi Banten.
3. Belum meratanya hasil usaha pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
4. Tingginya tingkat Pengangguran di Provinsi Banten berkontribusi terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Banten.
5. Belum terukurnya arah kebijakan pemerintah dalam mengentaskan masalah kemiskinan di Provinsi Banten.

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian, oleh karena itu penulis akan membatasi penelitian pada :

1. Pengaruh IPM, PDRB dan Jumlah Pengangguran Terhadap jumlah Penduduk Miskin
2. Penelitian dilakukan di Provinsi Banten
3. Periode tahun yang digunakan ialah 2014-2019, namun untuk Tahun 2016 terjadi kekosongan data untuk variabel Pengangguran

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya maka ditarik masalah untuk menganalisis “Pengaruh IPM, PDRB Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Penduduk Miskin Di Provinsi Banten Tahun 2014 – 2019”. sebagai berikut

1. Apakah Indeks Pembnagunan Manusia berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten pada tahun 2014– 2019 ?
2. Apakah Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten pada tahun 2014 – 2019 ?
3. Apakah jumlah pengangguran berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten pada Tahun 2014 – 2019 ?
4. Apakah IPM,PDRB, dan jumlah pengangguran berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten Tahun 2014 – 2019

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh IPM terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PDRB terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh IPM, PDRB, dan jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten tahun 2014 – 2019

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penulisan ini antara lain:

1. Bagi penulis

Merupakan suatu pembelajaran yaitu menganalisis suatu pengaruh IPM, PDRB dan jumlah Pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin sehingga penulis dapat mempraktikkan teori yang

didapat selama di perkuliahan dengan menganalisa dan memecahkan masalah.

2. Bagi pengambil kebijakan

Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan terhadap pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan pendidikan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Banten.

3. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan

Dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi bagi penelitian yang akan dilakukan pada periode selanjutnya.

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih tersusun dan terarah dalam pembahasan judul skripsi ini, maka disusun Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu;

Bab I Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka

pemikiran, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teori, yang meliputi teori dan kerangka berpikir.

Bab III Metodologi Penelitian, yang meliputi tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik analisis data dan hipotesis penelitian.

Bab IV Deskripsi Hasil Penelitian, yang meliputi deskripsi data, uji persyaratan analisis, pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V Penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.